

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Dalam sebuah karya penelitian, yakni karya tulis ilmiah, tidak ada yang bersifat mutlak asli dan benar-benar baru dihasilkan oleh seorang penulis maupun peneliti, dimana penelitian tersebut tidak terlepas dari pengaruh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyadari pentingnya melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang digarap. Pada bagian literatur revidi ini penulis memfokuskan terhadap literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penulis membagi kedalam tiga pokok pembahasan, diantaranya mengenai Investasi Asing, Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. Serta Dampak adanya Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan.

Untuk membahas Investasi Asing sektor Perkebunan Kelapa Sawit penulis merujuk pada tulisan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan Judul **“TINJAUAN BESAR PENANAMAN MODAL ASING PADA USAHA PERKEBUNAN”**.

Menjelaskan bahwa hutan tanaman merupakan salah satu sub sektor yang memiliki peran strategis penting dalam pembangunan nasional. Data nasional Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 menunjukkan bahwa pada harga sekarang, rata-rata kontribusi penanaman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian adalah 36,39%, yaitu 38,29% dari harga konstan 2010. Dihitung dengan harga saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) menyumbang 3,58% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016 dan 3,91% pada harga konstan 2010. Berdasarkan data di

atas, terlihat bahwa hutan tanaman merupakan penghasil devisa dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Peluang atau peran penting dalam melakukan bisnis untuk perusahaan. Rakyat Indonesia, memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan bahan baku, berbagai industri dalam negeri termasuk energi terbarukan, dan mendapatkan peluang nilai tambah dengan meningkatkan daya saing dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat, sektor perkebunan semakin berperan penting dalam memberikan peluang usaha atau lapangan kerja, sedangkan usaha atau kesempatan kerja yang diciptakan oleh sektor lain belum berkembang pesat.

Dalam membangun perkebunan yang tangguh diperlukan investasi serta modal dan teknologi yang baik, sehingga akselerasi pembangunan perkebunan dapat terus didorong terutama pada komoditas perkebunan yang memiliki prospek pasar yang baik di kanca internasional. Investasi asing juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Bersamaan dengan itu juga, perekonomian global menuntut keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama pada sub-sektor perkebunan (Kementrian Pertanian, 2019).

Selanjutnya masih perihal tentang Investasi Asing Penulis merujuk pada penelitian Masherri (2015) dengan judul **“PENGARUH KEBIJAKAN PERKEBUNAN TERHADAP PENANAMAN MODAL (PMDN DAN PMA)”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa Investasi Dalam perekonomian, tenaga penggerak dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja. Peran investasi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada industri tanaman perkebunan kelapa sawit. Pengembangan industri hilir sawit juga bisa dimanfaatkan oleh investor

asing dan impor dalam negeri. Kemunculan investor asing pertama kali diawali dengan meletusnya Revolusi Industri Eropa pada tahun 1760, khususnya di Inggris, dan menyebar ke Amerika Serikat pada tahun 1870. Kemudian penanaman modal asing masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Belanda dan India, yang memungkinkan Eropa untuk berinvestasi sawit, Kemudian pada tahun 1967 Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia diberlakukan. Pembangunan nasional adalah prioritas utama negara. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional, karena kontribusi terhadap pendapatan negara dan kontribusi daerah juga tidak dapat dipisahkan.

Penanaman modal asing di sub-sektor tanaman sawit (PMA) Riau merupakan bagian dari tujuan investasi investor asing, yang tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah. Kedatangan investor asing biasanya meningkatkan kesempatan kerja. Daerah yang menerima dana bagi penanam modal asing yang ingin menanamkan modalnya secara langsung, wajib ikut serta dalam usahanya sendiri dan mendirikan serta mendirikan badan usaha berstatus penanam modal asing, yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan nasional, perkebunan kelapa sawit juga menjadi bagian dari industri yang berorientasi terhadap ekspor. Ekspor merupakan bagian dari teori merkantilisme yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan devisa suatu negara untuk mendorong pembangunan suatu negara, sehingga negara tersebut harus meningkatkan ekspor daripada mengimpor. Ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia merupakan komoditas utama pemerintah Indonesia untuk memperkuat sektor kelapa sawit, dan sektor kelapa sawit merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional Indonesia (Masheri, 2015).

Selanjutnya pembahasan yang berkenaan dengan Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kerusakan Lingkungan maka Penulis menganalisis beberapa literatur yang berkaitan dengan persoalan tersebut, di antaranya tulisan yang dimuat oleh Greenpeace dengan judul “**BANKIR KOTOR**”. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, sektor tanaman sawit menghancurkan kekayaan hutan dan lahan gambut di Indonesia. Banyaknya lahan yang telah dihancurkan dan sudah dialihfungsikan menjadi konsesi pulp dan kelapa sawit. Kerusakan lingkungan menciptakan kondisi yang rentan untuk mengalami kerusakan hutan di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada satwa liar, iklim dan masyarakat. Penelitian dari Universitas Harvard dan Columbia memperkirakan bahwa selama krisis kebakaran hutan di tahun 2015, 100.000 orang dewasa di daerah hutan yang terbakar meninggal dunia, mengalami kematian dini sebagai bentuk akibat polusi dari asap kebakaran hutan dan lahan gambut. Kerugian keuangan juga terjadi sangat besar. Bank Dunia memperkirakan terjadinya kebakaran tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar US\$16 miliar, dua kali lipat estimasi nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia di tahun 2014 dan mengakui bahwa dengan menambahkan kerugian di tingkat regional dan global berarti angka sebenarnya jauh lebih tinggi lagi.

Pada September 2015, dari kebakaran tersebut terus melampaui emisi gas rumah kaca, tidak dapat disangkal lagi, ini adalah krisis dan para perusahaan di sektor perkebunan di Indonesia berada dalam pusat krisis ini. Greenpeace menganalisa, menunjukkan bahwa provinsi Riau dan Kalimantan Barat yang merupakan provinsi kunci penghasil minyak sawit, sekitar setengah dari titik kebakaran api yang tercatat pada tahun 2015, teridentifikasi berada di dalam konsesi bubur kertas atau kelapa sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga mengancam keanekaragaman hayati.

Misalnya, pada tahun 2016, IUCN telah melakukan perubahan terhadap klasifikasi Orangutan Kalimantan dari terancam menjadi nyaris punah, dan menyatakan bahwa kerusakan, degradasi dan fragmentasi habitat mereka termasuk alih fungsi lahan menjadi perkebunan, adalah penyebab utama terjadinya penurunan populasi mereka. Sebagian dari industri juga terlibat dalam kasus eksploitasi, termasuk eksploitasi pekerja anak, serta pengambil alihan lahan tanpa persetujuan dari masyarakat setempat, atau perusakan lahan mata pencaharian seperti perkebunan sagu, yang merupakan sebagai makanan utama masyarakat orang timur (Greenpeace, 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya penanam, pedagang dan perusahaan konsumen kelapa sawit telah menerbitkan kebijakan yang berupaya membebaskan ketergantungan mereka dari kelapa sawit yang terkait dengan perusahaan nakal yang melakukan ekspansi destruktif dan eksploitasi sosial. Masih menjadi pertanyaan sejauh ini seberapa efektif implementasi kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE). Pada Tahun 2016, laporan Greenpeace menunjukkan bagaimana peran para pemasok pedagang minyak sawit terbesar di dunia, terlibat deforestasi, kerusakan lahan gambut, eksploitasi pekerja termasuk anak-anak dan konflik masyarakat atau tindakan opresif seperti penggunaan aparat keamanan negara sebagai benteng suatu perusahaan. Pada bulan Desember 2016, Amnesty Internasional melaporkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia sudah sering terjadi di perkebunan yang dikuasai oleh Wilmar, yang mempunyai saham kelapa sawit terbesar di kanca internasional. Meskipun demikian, setidaknya ada suatu konsensus yang jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang menggunakan, menjual atau memperdagangkan minyak sawit harus mengambil tindakan yang berarti untuk memastikan bahwa rantai pasok mereka tidak mengakibatkan deforestasi ataupun pelanggaran hak asasi manusia.

Dari beberapa sumber literasi, penulis melihat Investasi Asing merupakan hal yang penting terhadap tingkat ekonomi Indonesia, hal itu dilihat dari beberapa penjelasan bahwa Tanaman sawit adalah salah satu indikator yang memberikan devisa negara, penambahan Lapangan pekerjaan serta mempermudah melakukan pengolahan karena dilakukan oleh alat-alat yang berbasis Teknologi, selanjutnya dengan adanya Investasi asing memberikan peningkatan komoditas kelapa sawit terus meningkat, peningkatan ini menjadikan Indonesia sebagai Negara terbesar no 1 yang melakukan Ekspor di bidang kelapa sawit, akan tetapi hal ini juga menjadi resiko terhadap keberlangsungan Lingkungan di Indonesia, dari temuan Greenpeace penebangan hutan terus dilakukan agar perluasan perkebunan semakin besar, akibatnya kerusakan lingkungan semakin parah dan sudah dirasakan oleh Masyarakat Indonesia, seperti halnya di tahun 2015 terjadi kebakaran hutan di pulau Sumatra dan Kalimantan sampai dirasakan oleh negara tetangga, Singapura dan Malaysia , kedua terjadinya banjir di beberapa daerah hal ini bisa terjadi dikarenakan daerah resapan Air dijadikan sebagai perkebunan, padahal seperti yang kita ketahui bahwa 1 batang sawit bisa menghabiskan 4,10-4,65 mm/hari. Penyebab selanjutnya penebangan hutan yang terus terjadi, hal ini juga dapat mengakibatkan daerah resapan air semakin berkurang dan akan jauh lebih mudah terjadinya bencana, yang terakhir hilangnya pasokan makanan, di Kawasan Indonesia bagian Timur, karena mereka mengandalkan sagu sebagai bahan makanan pokok, akibat dari adanya perluasan hutan yang semakin luas, pohon sagu menjadi langka dan akhirnya masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.

2.2 Paradigma Liberalisme Interdependensi

Modernitas membentuk kehidupan yang baru dan lebih baik, bebas dari pemerintah yang otoriter dan dengan tingkat kesejahteraan material yang jauh lebih

tinggi, kaum liberal umumnya mengambil pandangan positif tentang sifat manusia. Mereka memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional. Dengan kata lain konflik dan perang tidak dapat dihindarkan. Ketika manusia memakai akal pikiran mereka dapat mencapai Kerjasama yang saling menguntungkan bukan hanya dalam negara tetapi juga lintas batas internasional. Teoritis liberal kemudian yakin bahwa akal pikiran manusia dapat mengalahkan ketakutan manusia dan nafsu akan kekuasaan. Tetapi mereka tidak sepakat mengenai besarnya hambatan dalam perjalanan perkembangan manusia (Smith, 1992: 204).

Dengan demikian, semua kaum liberal sepakat bahwa dalam jangka Panjang kerja sama yang didasarkan pada kepentingan timbal balik akan berlaku. Hal itu disebabkan modernisasi yang terus-menerus meningkatkan ruang lingkup dan kebutuhan bagi Kerjasama (Zacher dan Matthew, 1995: 199), ringkasnya pemikiran ini sangat erat hubungannya dengan kemunculan negara konstitusional modern. Kaum liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang menimbulkan kemajuan dalam banyak bidang kehidupan.

Liberalisme interdependensi berarti ketergantungan timbal balik kedua negara, dengan demikian tingkat tertinggi hubungan transnasional antara negara berarti tingkat tertinggi interdependensi, hal itu juga mencerminkan proses modernisasi, yang biasanya meningkatkan tingkat interdependensi di antar negara di abad ke-20 khususnya di periode sejak tahun 1950-an telah memperlihatkan kebangkitan sejumlah besar negara industrialis (Pierre Rosanvallon, 1979). Sepanjang sejarah negara berupaya mencari kekuasaan dengan alat-alat kekuatan militer dan perluasan wilayah. Akan tetapi, bagi negara industrialis pembangunan ekonomi dan perdagangan luar negeri adalah alat-alat dalam mencapai keunggulan dan kesejahteraan

yang lebih mencukupi dan dengan sedikit biaya. Menurut Rosecrance Hal itu disebabkan biaya penggunaan kekuatan telah meningkat dan keuntungannya menurun, hal itu dikarenakan di mana dahulu penguasaan wilayah dan sumber daya alam banyak adalah kunci kejayaan. Dalam masa sekarang, bukan hal seperti itu lagi, sekarang kekuatan tenaga kerja yang sangat berkualitas, akses informasi dan modal keuangan yang menjadi kunci keberhasilan. Interdependensi yang jauh lebih besar dalam bentuk hubungan transnasional antarnegara dapat mewujudkan perdamaian dan tingkat ekonomi menjadi naik (Sorensen, 2013)).

Terkait dengan penjelasan di atas kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan pihak Investor asing adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara dalam upaya pembangunan ekonomi serta untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Jika dikaitkan dengan perkebunan kelapa sawit, teknologi yang digunakan Indonesia masih belum memenuhi standar, baik dari pembibitan sampai dengan produksi, oleh karena itu diperlukan Investor untuk memenuhi standar yang diperlukan agar hasil produksi nanti menghasilkan standar yang ditetapkan serta memenuhi kebutuhan negara-negara sesuai dengan kualitas ditentukan.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk membantu mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori dan konsep, diantaranya Investasi, Paradigma Liberalisme Interdependensi, Teori pembangunan disertai dengan konsep, Industri Perkebunan Kelapa Sawit, kerusakan lingkungan, pembangunan berkelanjutan dan yang terakhir adalah green constitution, yang akan membantu menjelaskan serta menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2.3.1 Teori Investasi

Istilah investasi juga disebut Penanaman Modal yang dapat digunakan dengan Aktivitas berbeda. Menurut Dr. Eduardus, investasi adalah komitmen pada banyak proyek atau sumber daya lain yang saat ini digunakan untuk tujuan perolehan keuntungan yang banyak untuk di masa depan. Karena itu, keinginan investor ditekan Sekarang, agar keuntungan di masa depan dapat terpenuhi. Menurut Jogiyanto phd, investasi yang membuat konsumsi untuk produksi yang efisien terhadap jangka waktu tertentu yakni produksi minyak sawit hal itu dikarenakan tanaman minyak sawit memiliki nilai ekonomi tinggi, Sehingga memberikan keuntungan bagi para investor. Menurut McGraw Hill, *an investment is the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits*, (investasi adalah komitmen saat ini yang terkait dengan uang atau sumber daya lain, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan). Dalam kegiatan ekonomi, investasi dapat berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung;

- 1) Investasi langsung adalah aktivitas membeli aset keuangan secara langsung dari perusahaan melalui perantara atau dengan menggunakan cara lain seperti yang dilakukan dengan membeli aset keuangan yang diperdagangkan di pasar mata uang, pasar modal atau pasar turunan.
- 2) Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang memiliki portofolio aset keuangan perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang memberikan jasa keuangan dengan menjual sahamnya

kepada publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk berinvestasi pada portofolio investasinya.

Dalam buku investasi lainnya, investasi juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Investasi dalam bentuk aset fisik yaitu investasi dalam bentuk aset berwujud dan seperti emas, permata, pertambangan mineral, budidaya perkebunan, pertanian, industri dan pertambangan.
- 2) Investasi dalam bentuk surat berharga (aset keuangan yang dapat diperjualbelikan) yaitu investasi dalam bentuk surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang diatur oleh *institusi* maupun *individu* tertentu, seperti halnya obligasi, saham, waran, dll.

Merujuk pada penjelasan di atas bahwa penulis meyakini bahwa penelitian ini, jenis investasi yang digunakan adalah investasi dalam bentuk aset aktual (*direct investment*) yaitu penyertaan uang secara langsung ke dalam suatu perusahaan, dengan tujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian keuntungan yang besar. Bentuk penanaman modal langsung yang dilakukan oleh investor adalah pembukaan lahan perkebunan dan industri pengolahan minyak kelapa sawit. Di mana investor berhak melakukan bentuk usahanya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh masing-masing negara.

Dalam sistem internasional, tidak ada negara yang dapat memenuhi semua kebutuhannya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kerjasama antar negara dapat menjadi resolusi yang sering dilakukan oleh negara. Selain menciptakan perdamaian dan kesejahteraan yang menjadi harapan seluruh negara di dunia, perlu pula kerjasama dalam skala global untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dan eksistensi suatu negara dalam sistem hubungan internasional. Ada beberapa bentuk kerjasama di

bidang internasional yaitu kerjasama regional, kerjasama multilateral, kerjasama internasional dan kerjasama bilateral. Mengacu pada pembahasan dalam studi ini yaitu kerjasama Indonesia dalam membuka investasi asing kepada semua negara yang ingin berinvestasi di perkebunan kelapa sawit adalah Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Belgia.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kerjasama merupakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mempengaruhi antara kedua negara. Hal ini sangat sejalan dengan kerjasama antara Indonesia dengan investor asing, dalam diskusi tersebut beberapa negara bekerja sama untuk kepentingan nasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara khususnya di bidang industri perminyakan dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa tahun terakhir ini minyak sawit menjadi kebutuhan yang sangat penting masyarakat internasional, Dikarenakan minyak sawit merupakan salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak sawit itu sangat murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil, serta dapat digunakan dalam berbagai makanan, kosmetik, dan juga dapat digunakan sebagai biofuel atau biodiesel (Komara, AcepAriningrum, 2012).

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Total output kedua negara ini menyumbang sekitar 85-90% dari total minyak sawit dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi penghasil dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Industri kelapa sawit Indonesia terus berkembang, pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan luas areal kelapa sawit yang didorong oleh produksi dan ekspor Indonesia serta peningkatan permintaan global. Beberapa negara meyakini bahwa kurangnya kebutuhan pokok minyak sawit telah

mendorong kerjasama, sehingga produksi minyak sawit dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global (Kementrian Pertanian, 2019).

2.3.2 Teori Pembangunan

Rostow mengatakan dalam bukunya yang terkenal "*Economic Growth Stage: Non-Communist Manifesto*" bahwa negara berkembang yang ingin maju harus melalui tahap pembangunan yaitu: (1) The traditional society atau tahap masyarakat tradisional adalah suatu negara yang struktur masyarakatnya dibangun di dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas. Tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah karena tidak adanya penerapan pengetahuan dan teknologi modern. Karena terbatasnya produktivitas, maka sebagian terbesar sumber-sumbernya ditujukan untuk menghasilkan bahan mentah; (2) The preconditions for take off atau tahap prakondisi menuju tinggal landas (take off) yaitu meliputi masyarakat yang sedang dalam proses peralihan atau merupakan suatu periode yang menunjukkan adanya syarat-syarat menuju take off. Nilai-nilai 21 dan cara-cara tradisional sudah mulai dirasakan menjadi tantangan, sedangkan nilai-nilai dan cara-cara baru yang lebih efisien mulai masuk. Perubahan-perubahan mulai terjadi ke arah masyarakat yang lebih modern dengan sistem ekonomi yang lebih maju; (3) Take off atau tahap tinggal landas adalah tahapan perkembangan ekonomi memasuki masa antara, ketika hambatan-hambatan dan rintangan-rintangan terhadap pertumbuhan sudah mulai dapat diatasi. Nilai-nilai, cara-cara baru, dan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan kemajuan ekonomi meluas dan mulai menguasai masyarakat. Tingkat investasi naik dari 5 sampai 10 persen atau melebihi pendapatan nasional. Selama masa tinggal landas, industri-industri baru berkembang dengan pesat dan menghasilkan keuntungan yang

sebagian besar diinvestasikan lagi pada pabrik-pabrik yang baru atau industri-industri baru. Sehingga daripadanya dapat mendorong perluasan lebih lanjut bagi daerah-daerah kota dan industri-industri modern lainnya; (4) The drive to maturity atau tahap gerak menuju kematangan adalah tahap ketika kegiatan ekonomi tumbuh secara terus-menerus dengan teratur dan penggunaan teknologi modern meluas ke seluruh aspek kegiatan perekonomian. Kira-kira 10 sampai 20 persen pendapatan nasionalnya, secara terus-menerus diinvestasikan yang memungkinkan output meningkat dengan cepat melebihi pertumbuhan penduduk. Kegiatan ekonomi bergerak dengan mantap memasuki perekonomian internasional. Pada umumnya, tahap kematangan (maturity) ini dicapai kira-kira setelah 60 tahun dimulainya take off atau 40 tahun setelah berakhirnya take off, dan (5) The age of high mass consumption atau tahap konsumsi massa tinggi adalah tahap ketika perkembangan industri lebih ditujukan untuk menghasilkan barang-barang konsumsi tahan lama dalam bidang jasa (Rostow, 1960).

Menurut Rostow (1960)), disamping adanya tahapan perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai proses yang menyebabkan adanya perubahan pada : (1) perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar; (2) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil; (3) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif; dan (4) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang

pembangunan ekonomi, misalnya: penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi seseorang.

Jika dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini, Indonesia saat ini berada dalam pembangunan industri perkebunan kelapa sawit tahap *the preconditions for take off* atau tahap prakondisi menuju tinggal landas (*take off*) yang meliputi masyarakat yang sedang dalam proses peralihan atau merupakan suatu periode yang menunjukkan adanya syarat-syarat menuju take off. Nilai-nilai dan cara-cara tradisional sudah mulai dirasakan menjadi tantangan dan ditandai oleh perubahan perubahan mulai terjadi ke arah masyarakat yang lebih modern selain itu pembangunan ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Selain itu pembangunan ini juga akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi serta memberikan dampak peralihan teknologi yang sangat signifikan khususnya pelaku usaha masyarakat yang mempunyai luas lahan perkebunan hanya beberapa luasan hektar dapat memberikan manfaat terhadap keunggulan hasil produksi minyak kelapa sawit.

2.3.3 Industri Perkebunan Kelapa Sawit

Pada Tahun 2018, sektor perkebunan merupakan penyumbang tertinggi untuk PDB, yaitu sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian sebesar 35 persen diatas tanaman pangan, peternakan. Selain sebagai pemasok keuangan PDB, sub sektor perkebunan juga berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dengan nilai investasi yang sangat tinggi, berkontribusi untuk menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional, sebagai sumber devisa negara dari komoditas ekspor, berkontribusi untuk peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea yang keluar, menyediakan bahan pangan dan bahan baku

industri, menyerap ketenagakerjaan, serta menyediakan bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan. Salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai andil penting terhadap perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting yang dapat menghasilkan minyak makanan, minyak industri maupun bahan bakar nabati, *biodiesel*. Kelapa sawit juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagai salah satu komoditas ekspor pertanian terbesar di Indonesia, membuat kelapa sawit mempunyai peran yang penting sebagai sumber penghasil devisa negara maupun pajak yang besar.

Dalam proses produksi maupun pengolahan industri minyak sawit, perkebunan kelapa sawit juga mampu menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat pedesaan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan menerapkan pemberdayaan dilakukan oleh perusahaan. Hasil olahan minyak kelapa sawit sangat mudah untuk ditemukan dalam produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, kosmetik, kebutuhan dasar, hingga bahan bakar minyak nabati. Produksi kelapa sawit di Indonesia memiliki potensi menghasilkan manfaat-manfaat lokal jika pengembangannya mengikuti pengelolaan yang berkelanjutan antara lain meningkatkan penghasilan bagi masyarakat sekitar, pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Potensi yang dimiliki kelapa sawit sangat baik, komoditas kelapa sawit di perdagangan minyak nabati dunia telah bersinergi dengan pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit (Kementerian Pertanian, 2019).

Prospek perkembangan industri kelapa sawit di tahun ini sangat pesat, dimana terjadi peningkatan baik luas areal maupun produksi kelapa sawit seiring dengan

meningkatnya kebutuhan serta permintaan negara lain. Pada Tahun 2019, luas areal perkebunan kelapa sawit tercatat mencapai 14.326.360 hektar. Dari luasan tersebut, sebagian besar telah diusahakan oleh perusahaan besar swasta yaitu sebesar 55,08% atau seluas 7.892.707 hektar sedangkan Luas areal Kelapa Tahun 2018 mencapai 3.417.941 hektar, dari luasan tersebut sekitar 98% atau seluas 3.385.085 hektar. Perkebunan Rakyat menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan luas 5.818.889 hektar atau 40,63% sedangkan sebagian kecil diusahakan oleh Perkebunan Besar Negara yaitu seluas 614.755 hektar atau 4,28%.

Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar Negara	Perkebunan Besar Swasta
40,63%	4,28 %	55,08 %

Table 0.1 Luas Areal Kelapa Sawit 2018

Selama lima tahun terakhir (Tahun 2015-2018), luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,98% kecuali pada Tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit sedikit mengalami penurunan sebesar 0,6% atau sekitar berkurang seluas 58.812 hektar. Dari tahun 2014-2018, total luas areal perkebunan kelapa sawit kian bertambah 3.571.549 hektar. Di perkirakan Luas areal Industri perkebunan kelapa sawit akan terus meningkat dikarenakan semakin pesatnya perkembangan industri minyak kelapa sawit saat ini, kebutuhan minyak nabati dunia yang cukup besar dan semakin bertambah serta komitmen presiden Jokowi untuk menjadikan komoditas sawit sebagai komoditas utama yang diprioritaskan (Kementrian Pertanian, 2019).

2.3.4 Kerusakan Lingkungan

Pemanasan global (*global warming*) telah menjadi masalah dan perhatian Bersama oleh banyaknya negara. Pemanasan global dan salah satu dampaknya adalah perubahan iklim global (*global climate change*) seperti adanya pergeseran peta iklim secara global, anomali iklim, banjir, kekeringan, badai, naiknya permukaan laut, dan lain-lain, hal ini telah menimbulkan kerugian besar dan bahkan telah mengancam keberlanjutan kehidupan di planet bumi ini. Persoalan pemanasan global, jelas merupakan persoalan yang sangat serius dan memerlukan solusi yang fundamental dan holistik. Mengingat persoalan tersebut merupakan kemerosotan mutu ekosistem planet bumi, maka solusinya haruslah bersifat global. Setiap manusia, dan setiap negara perlu menempatkan dirinya sebagai bagian dari solusi (*problems solver*). Untuk itu, diperlukan pemahaman yang sama, kesetaraan dan objektif tentang penyebab masalah pemanasan global sehingga solusi yang dihasilkan dapat ditemukan secara objektif pula (Jan Horas V. Purba, 2018).

Pembangunan dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan yang menghasilkan konflik, karena setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Hal-hal yang bertentangan akan terjadi apabila setiap pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian yang besar. Timbulnya kerugian tersebut sebagai resiko yang berasal dari aktivitas yang ditujukan terhadap kerusakan lingkungan jika sebelumnya tidak dipertimbangkan seberapa jauh kemampuan suatu lingkungan dapat menerima aktivitas pembangunan yang ada. Kemampuan lingkungan dapat diuji dari sifat produktifnya, sifat daya pulihnya, sifat adaptasinya, dan sifat kemampuan menerima segala bentuk keadaan eksternal sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan lingkungan, yang juga dapat dilihat dari sudut sifat atau faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting untuk menilai kualitas

lingkungan. Semakin produktif suatu alam maka semakin baik pula kualitas lingkungan tersebut. Semakin cepat lingkungan melakukan adaptasi atas aktivitas eksternal yang tertuju padanya, maka lingkungan tersebut juga akan disebut berkualitas. Sebaliknya, bila tingkat kemampuan lingkungan tetap terlampaui oleh aktivitas pembangunan, maka akan terjadilah kerusakan lingkungan. Faktor yang seringkali terjadi karena faktor eksternal lebih besar daripada kemampuan suatu lingkungan tersebut (Magnetisme, 1980).

Dalam dua tahun terakhir ini, sektor perkebunan telah menghancurkan hutan dan lahan gambut Indonesia. Jutaan hektar telah dihancurkan dan dialihfungsikan untuk menjadi konsesi perkebunan kelapa sawit. Kerusakan lingkungan menciptakan kondisi yang rentan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap satwa liar, iklim dan masyarakat. Sebuah penelitian dari Universitas Harvard dan Universitas Columbia memperkirakan bahwa selama krisis kebakaran hutan pada tahun 2015, lebih dari 100.000 orang di kawasan yang terbakar telah meninggal dunia, mengalami kematian dini sebagai bentuk akibat dari polusi asap kebakaran hutan dan lahan gambut. Kerugian keuangan juga berdampak, Bank Dunia memperkirakan bahwa kebakaran tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian bagi ekonomi Indonesia sebesar US\$16 miliar atau dua kali lipat estimasi nilai tambah ekspor minyak sawit bruto Indonesia pada tahun 2014 dan telah mengakui bahwa ‘dengan menambahkan kerugian di tingkat regional dan global berarti angka sebenarnya jauh lebih tinggi lagi’ (Greenpeace, 2017).

2.3.5 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Lingkungan telah menjadi agenda politik sejak akhir tahun 1960-an, bahwa keadaan lingkungan ekologis yang terjadi semakin buruk. Kebijakan serta peraturan perlindungan, kebanyakan negara-negara secara resmi telah berkomitmen pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, akan tetapi prioritas hampir selalu diberikan untuk pertumbuhan ekonomi terhadap perlindungan lingkungan. Berbagai Upaya membangun kerjasama internasional untuk mengatasi persoalan lingkungan global seperti perubahan iklim, menjadi pusat perhatian diplomasi internasional, namun negara USA menolak untuk membuatnya bahkan mengurangi emisi yang terbatas dan tidak menyetujui hal itu terkandung di Protokol Kyoto, negara-negara maju dan berkembang pesat seperti Cina dan India belum diharuskan untuk membuat komitmen apapun, Padahal tidak diragukan lagi bahwa isu lingkungan memiliki dampak yang besar terhadap politik, frekuensi adopsi pemerintah merespon hal yang berbeda terhadap masalah lingkungan dikarenakan menimbulkan sinis berpikir bahwa mungkin tidak banyak yang akan benar-benar berubah. Teka-teki ini adalah satu dari banyaknya tantangan yang dihadapi politik lingkungan, yang telah terjadi dengan cepat dan menjadi subjek penyelidikan politik (William N. Rom, 2012).

Persoalan tentang lingkungan dan perlindungan alam merupakan isu penting di dunia internasional. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki kewajiban moral untuk mengelola sumber daya alamnya secara bijak. Selain itu, masyarakat semakin sadar bahwa kelestarian lingkungan merupakan kebutuhan hidup, dan juga kebutuhan yang paling penting. Di tingkat nasional, pemenuhan kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan ditransformasikan menjadi suatu kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah contohnya. Pembangunan

berkelanjutan adalah untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan sektor ekonomi, pembangunan sektor sosial dan perlindungan lingkungan (Sustainable Development, 2004).

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (1980) dalam *world conservation strategy* mendefinisikan sebagai Pembangunan berkelanjutan harus mengimplementasikan pembangunan Menurut faktor lingkungan, sosial dan ekonomi Tentang sumber daya hayati dan mempertimbangkan manfaat atau Kerugian jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan alternatif.

Sementara itu Undang–undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai Upaya sadar dan terencana untuk mengintegrasikan lingkungan, masyarakat, Dan ekonomi dimasukkan ke dalam strategi pembangunan untuk memastikan integritas Lingkungan dan keselamatan, kapasitas, kesejahteraan dan kualitas Hidup di generasi sekarang dan masa depan. Kedudukan Definisi di atas merupakan paradigma pembangunan yang awalnya difokuskan Untuk alasan ekonomi saja, itu beralih ke paradigma pembangunan Sektor lingkungan dan sosial adalah sektor penting.

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada tiga pilar, yaitu Pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga pilar harmoni tersebut merupakan implementasi dari pembangunan Harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip pembangunan berkelanjutan setidaknya memiliki empat poin, prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- 1) Keadilan sosial, prinsip pertama ini bermakna proses pembangunan, harus terus memastikan distribusi sumber daya yang adil serta pemanfaatan

sumber daya alam harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan juga harus menjamin kesejahteraan di semua tingkatan lapisan masyarakat;

- 2) Menjunjung nilai keanekaragaman. Keanekaragaman hayati beserta budaya diperlukan untuk dijaga dalam menjamin keberlanjutan. Keanekaragaman hayati mempunyai hubungan agar terjadinya keberlanjutan sumberdaya alam, sedangkan keanekaragaman budaya terkait atas perlakuan yang sama terhadap semua orang;
- 3) Nilai-nilai integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan kedekatan manusia dan alam. Menjadikan manusia dan alam sebagai unsur yang tidak dapat berdiri sendiri;
- 4) Jangka panjang, pembangunan berkelanjutan memiliki orientasi tidak hanya pemenuhan kebutuhan di masa kini melainkan kebutuhan di masa depan harus dapat di jaman agar generasi masa depan mendapatkan Kawasan lingkungan yang sama atau bahkan jauh lebih baik.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, Indonesia berada pada tahap untuk meningkatkan sektor ekonomi salah satunya yaitu peningkatan industri perkebunan kelapa sawit hal itu didukung dengan Kawasan luas lahan yang dimiliki sangat melimpah, tentu hal yang paling penting untuk dicermati adalah bukan pada tahap pembangunannya, namun pada keseimbangan ekologi, manusia, dan makhluk hidup lain di luar manusia. Sikap ini haru di yakini bahwa dengan menjaga keseimbangan ekologi dan menyelamatkannya dari krisis lingkungan, pada hakikatnya kita turut andil melindungi manusia itu sendiri. Sehingga *sustainability* yang harus dijaga adalah pada upaya menjaga keseimbangan lingkungan, bukan pada

upaya menjaga kesinambungan mengejar target pembangunan di sektor perekonomian.

2.3.6 Green Constitution

Secara internasional, konsep pembangunan berkelanjutan dapat mengikuti apa yang telah dirumuskan dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*The World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987. Laporan tersebut dikenal “Laporan Brundtland” berjudul “*Our Common Future*” menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development concept*) (Yusa & Hermanto, 2018).

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan atau merusak kebutuhan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, di Indonesia keberadaan kelestarian lingkungan dianggap sebagai proses yang sangat diperlukan untuk memelihara kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Organisme lain merupakan salah satu unsur dan merupakan dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini dirumuskan dan didefinisikan secara hukum berdasarkan konsep *Green Constitution* terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Hal ini menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Dan itu diatur dalam undang-undang pokok terkait lingkungan hidup di Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) (Nurmardiansyah, 2015).

Dalam perkembangan eksploitasi yang dilakukan manusia dan alam berlangsung abad ke-20, kita telah menyaksikan kemerosotan yang luar biasa dalam keseimbangan ekosistem dunia. Semua ini disebabkan oleh tindakan skala besar berupa eksplorasi dan pengembangan alam untuk menggali manfaat ekonomi dan kebutuhan dasar manusia dalam proses industrialisasi skala besar di seluruh dunia. Lingkungan alam di berbagai tempat akan mengalami kerusakan dan degradasi fungsi secara bersama-sama, serta penurunan daya dukung kehidupan. Padahal, alam semesta dan alam di sekitar kita memiliki ekosistem yang saling bergantung. Kehancuran suatu kawasan juga akan menyebabkan kerusakan pada kawasan lainnya, dan kehancuran suatu spesies juga akan menyebabkan perubahan gaya hidup. Perubahan ini awalnya bergantung pada keberadaan spesies, yang memungkinkan manusia untuk berhasil menikmati kebebasan hidup bersama, tetapi kebebasan sebenarnya. Akibatnya, manusia menjadi sewenang-wenang dan eksploitatif.

Terdapat kesamaan dengan penjelasan "*maxim power tends to corrupt*" Lord Acton berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi modern dapat disalahgunakan oleh rakyat itu sendiri. Manusia dengan predikat bebas akan mampu melakukan tindakan tanpa kendali, dengan mengorbankan lingkungan sekitar dan seluruh lingkungan. Manusia melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan alam dengan segala kemungkinan kekerasan, hanya untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerusakan lingkungan yang dapat merugikan generasi sekarang dan yang akan datang. Dari perspektif yang berbeda, kita dapat mengatakan bahwa demokrasi secara langsung atau tidak langsung mengarah pada kerusakan lingkungan di seluruh dunia (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S, 2009).

Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh indikator-indikator sebagai berikut: pihak penegak hukum (yaitu pihak yang membuat atau

melaksanakan hukum), orang yang disandera karena berbagai kepentingan, keinginan, kekuasaan, serta faktor politik dan ekonomi, di sisi lain, hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menunjukkan bahwa suap dan pembelian desain produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit telah membawa tekanan terhadap sektor perekonomian. Pengelola harus mematuhi prinsip hukum umum di bidang kesadaran dan perhatian lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan, dan melalui pembatasan pembangunan berkelanjutan tersebut (termasuk proses dan tujuan), dapat menunjukkan terjadinya dan kearifan pengelolaan lingkungan. Menjaga tingkat pembangunan yang terukur, sehingga tidak mengambil tindakan pembangunan yang wajar dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang, dan sebaliknya. Hanya pada generasi ini kita dapat mencapai kesinambungan pembangunan yang rasional dan bijaksana untuk generasi mendatang (Yusran & Asnelly, 2017).

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis atau yang juga disebut sebagai anggapan dasar untuk menjawab penelitian sementara. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Jika investasi pada PT. Agro Muko melakukan kejahatan kehutanan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan negara dan kawasan hutan produksi maka kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu semakin meningkat”

2.5 Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk membantu dalam menganalisis penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat Verifikasi Variabel dan Indikator agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis dengan menggunakan tolak ukur berdasarkan konsep

teoritik. Verifikasi variabel dan indikator pembentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 0.2 Variabel Dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi Analisi
<p>Variabel Terikat:</p> <p>Kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu semakin meningkat.</p>	<p>1. Kerusakan lingkungan di Provinsi Bengkulu</p>	<p>1. Perkebunan sawit telah menghancurkan hutan dan Kawasan hutan produksi. Jutaan hektar telah dihancurkan dan dialihfungsikan menjadi konsesi kelapa sawit. Kerusakan ini menciptakan kondisi yang rentan untuk terjadinya kerusakan lingkungan diantaranya, kebakaran hutan, banjir, hilangnya air bersih, polusi udara akan menyebabkan terjadi kekeringan, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada satwa liar, iklim dan masyarakat.</p>
<p>Variabel Bebas:</p> <p>Jika investasi pada PT. Agro Muko melakukan kejahatan kehutanan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan negara dan kawasan hutan produksi.</p>	<p>1. Investasi Pada PT. Agromuko</p>	<p>1. Pada tahun 1921, sebuah perusahaan penanaman bernama PT Sipef didirikan di Sumatera Utara. Perusahaan ini sepenuhnya dari Penanam Modal Asing (PMA) yang merupakan agro-industri yang terdaftar di NYSE Belgia-Euronext Brussels PT. Agromuko adalah perusahaan kelapa sawit dengan kepemilikan HGU terluas di Provinsi Bengkulu. Total keseluruhan konsesi HGU nya mencapai 28.615 ha (BPN;2016). Izin HGU tersebut berada di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Pinang, Kecamatan Pondok Suguh, Kecamatan Teras</p>

	<p>2. Kejahatan kehutanan dengan melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di dalam Kawasan hutan negara dan kawasan hutan produksi</p>	<p>Terunjam dan Kecamatan Teramang Jaya, kabupaten Mukomuko. Perusahaan yang tergabung dalam SIPEF Group ini pertama sekali mendapatkan izin HGU saat rezim Soeharto, tepatnya pada 1989. (Kanopi Prov.Bengkulu, 2019).</p> <p>2. Persoalan perizinan di sektor perkebunan memang saat ini masih sengkabut, Kejahatan kehutanan juga dilakukan oleh PT. Agromuko, dengan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan negara. PT. Agromuko tepatnya SEIF Betung estate mulai melakukan perambahan di Hutan Produksi Terbatas (HPT). Yang kedua Penulis berpendapat bahwa PT. Agromuko juga melakukan pelanggaran terhadap UUD dengan bunyi pasal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Deforestasi PT. Agromuko, 2020).</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Skema dan Alur Penelitian

